



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BADAN PENGHUBUNG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RKPD Tahun 2025 dan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 20 Pebruari 2024, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali telah dapat melaksanakan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun demikian mengingat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Badan Penghubung Provinsi Bali membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Jakarta, Juli 2024



KEPALA BADAN PENGHUBUNG

**ARIFIN EFENDI, ST., MT**

NIP. 197107142000031003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.....	12
2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali .....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali .....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....	33
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	33

3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali.....	44
	3.2.1 Tujuan.....	44
	3.2.2 Sasaran .....	45
3.3	Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI .....	48
BAB V	P E N U T U P .....	49

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1	Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	12
TABEL 2	Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 .....	14
TABEL 3	Target dan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023 .....	18
TABEL 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun s.d 2023.....	22
TABEL 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung.....	26
TABEL 6	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025.....	27
TABEL 7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	31
TABEL 8	Strategi dan arah kebijakan RPD 2024-2026.....	33
TABEL 9	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali 2024- 2026.....	40
TABEL 10	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Tahun 2025.....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

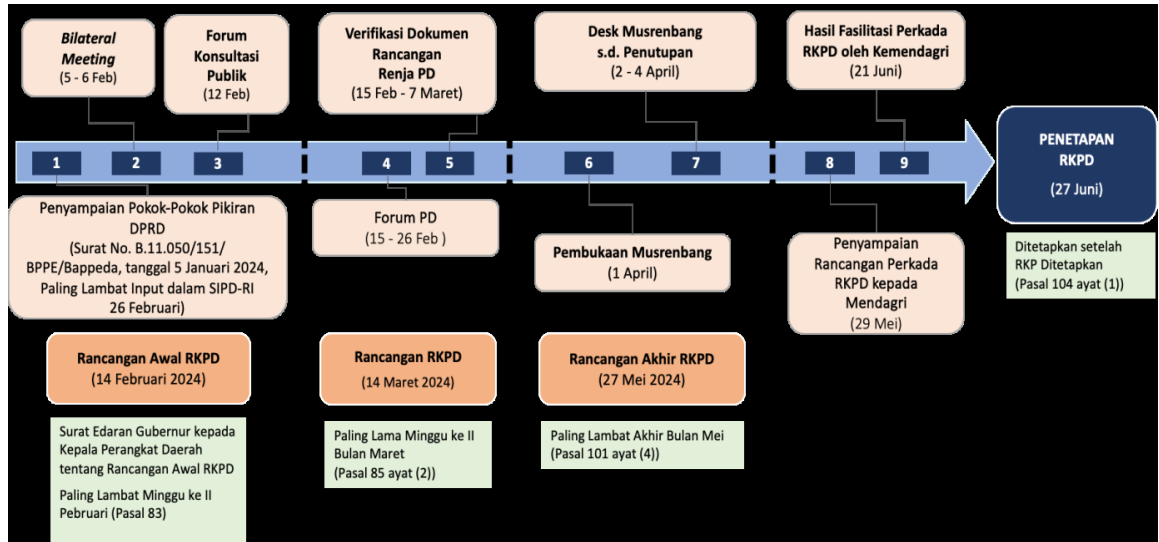
Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Tentang RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 inilah yang dijabarkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 dan Renja PD Tahun 2025.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah;



(4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2025 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

### Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi money follow programs menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan bagi Pejabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Sesuai dengan alur perencanaan Badan Penghubung selaku salah satu SKPD di Pemprov Bali saat ini membuat Rancangan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Rancangan RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Rancangan RENJA SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian Rancangan RENJA PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA PD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai salah satu OPD di Provinsi Bali memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan RKPD Provinsi Bali 2025 dan Renstra PD yang telah dibuat berdasarkan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Bali.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar seksi pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Bab I      PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

**Bab II     HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI  
BALI**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Penghubung, analisis kinerja pelayanan Badan Penghubung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, provinsi, tujuan dan sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali, program dan kegiatan

**Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

Memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari 2 (dua) Program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

**Bab V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali**

Pada Tahun 2023 merupakan tahun Kelima pelaksanaan Renstra 2019-2023. Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali 2019-2023, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Penghubung

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, yaitu :

**A. Capaian Kinerja Sasaran Renstra**

**TABEL 1**

**CAPAIAN KINERJA SASARAN RENSTRA**

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	88,32	90	88,32	98,13%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		88,34			
2. Pembinaan Masyarakat Bali di Jakarta		93,29			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		87,00			
4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		84,66			

#### B. Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

**Tabel 2**  
**Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2023**

No	Program	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	%
1	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	88,32	98,13
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi manajemen kinerja (Nilai LKjIP)	82	83,48 (Tahun 2022)	101,80

Tabel  
ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM/KEGIATAN/  
SUB. KEGIATAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	98,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	101,80	menunjang
1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100	menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100	Menunjang

2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
3				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Menunjang
d				Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
e				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Menunjang
4				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	Menunjang

a				Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	100	Menunjang
5				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	Menunjang
c				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	100	Menunjang
4				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	Menunjang
a				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang
b				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100	Menunjang

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang dipelihara/direhabilitasi		
c			Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	100	Menunjang
B			Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	98,13	Menunjang
1			Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	98,13	Menunjang
a			Sub. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	100	Menunjang
b			Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	100	Menunjang
c			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	100	Menunjang

C. Capaian Kinerja Anggaran

**Tabel 3**

**Target dan Capaian Kinerja Anggaran  
Tahun 2023**

No	Uraian	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Kinerja Anggaran	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00

**Tabel**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.800.606.885,00</b>	<b>4.993.053.506,00</b>	<b>86,08</b>
a.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.663.200,00	4.663.200,00	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.663.200,00	4.663.200,00	100
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.809.812,00	2.529.145.139,00	88,50
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.857.809.812,00	2.529.145.139,00	88,50
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.774.300,00	158.018.397,00	83,71
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500,00	10.190.500,00	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500,00	30.627.700,00	99,86
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.425.300,00	8.407.700,00	99,79
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000,00	28.792.497,00	48,40
d.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik	312.413.999	143.484.999	45,93

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.413.999	143.484.999	45,93
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.091.793.830	1.054.108.069	96,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	3.846.000	55,02
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	200.507.079	89,11
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.803.830	849.754.990	98,83
f.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.151.744	1.103.633.702	82,05
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	881.759.628	806.559.032	91,47
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	180.952.566	53,22
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.392.116	116.122.104	94,11
<b>B.</b>	<b>Program Pelayanan Penghubung</b>	<b>3.326.865.180</b>	<b>2.870.930.378</b>	<b>86,30</b>
g.	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.326.865.180	2.870.930.378	86,30
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	275.569.600	214.084.200	77,69
2	Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	259.617.116	203.492.104	78,38
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.791.678.464	2.453.354.074	87,88
Jumlah Belanja Langsung		9.127.472.065	7.863.983.884	86,16

#### D. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Tahun 2023 masih menjadi masa pemulihan perekonomian Bali sejak Pandemi Covid-19. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai dengan bidang, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.2 Realisasi Belanja TA 2023**

(dalam rupiah)

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
5.07.0.00.0.00.01	BADAN PENGHUBUNG	9.127.472.065,00	7.874.007.249,00	86,27
	BELANJA OPERASI	8.375.058.066,00	7.460.679.193,00	89,08
	BELANJA MODAL	752.413.999,00	413.328.056,00	54,93
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.127.472.065,00</b>	<b>7.874.007.249,00</b>	<b>86,27</b>

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali yang penyerapan anggaran kegiatannya di bawah 75% dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali di bawah 75%**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	28.792.497	48,40	Efisiensi anggaran karena mengikuti rapat lebih banyak menggunakan zoom
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	312.413.999	143.484.999	45,93	Tidak diajukan kebutuhan sarana karena adanya SE terkait efisiensi dan pembatasan pencairan anggaran
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	6.990.000	3.846.000	55,02	Efisiensi pengiriman dokumen menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas.
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	180.952.566	53,22	Tidak diajukan kebutuhan pemeliharaan karena menyesuaikan dengan SE terkait efisiensi dan pembatasan pencairan anggaran

#### E. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Terdapat 2 (dua) Program Badan Penghubung Provinsi Bali dalam mewujudkan kelancaran Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Penghubung Propinsi Bali. Dari 2 (dua) program tersebut mengakomodir 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bali, yaitu peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

Secara rata-rata Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2023 sudah melampaui target yaitu 88,32.

Tabel 4 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Badan Penghubung									
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat									
	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	88,32	90	88,32	98,13%	90	88,32	98,13%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	88,32	90	88,32	98,13%	90	88,32	98,13%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%

				Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82		82			82	82	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	33 dok	33 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 lap	100%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen administrasi keuangan	18 orang 60 dok	18 orang 60 dok	18 orang 12 dok	16 orang 12 dok	88,88% 100%	18 orang- 12 dok	16 orang 12 dok	88,88% 12 dok
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	15 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 paket	20 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapatrapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	75%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	25 unit	25 unit	15 unit	10 unit	75%	15 unit	10 unit	75%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	60 lap	60 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	8 unit	4 unit	4 unit

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali**

Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Mempermudah koordinasi pemerintahan daerah ke pusat
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta
4. Sebagai sarana promosi dan informasi budaya dan pariwisata Bali di Jakarta
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung.

Sesuai dengan Tugas tersebut Badan Penghubung menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung dalam bentuk Renstra (Rencana Strategi) Badan Penghubung Provinsi Bali. Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi (Renstra) periode 2019-2023 yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2019-2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan wisma/penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta

Tabel 5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan penerima pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	75	80	90	90	89,27	88,32	90	90	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

Berikut ini isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi :

1. Belum optimalnya peran Badan Penghubung dalam upaya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat di Ibu Kota
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyebaran promosi informasi untuk pengembangan potensi daerah Bali di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta
3. Belum optimalnya penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung yang memungkinkan dilaksanakan menggunakan CSR
4. Belum optimalnya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung

## 2.4 Review Terhadap Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan RPD tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

Tabel 6 : Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Penghubung

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Ket
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	6.835.886.088	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Jakarta	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	6.434.088.379	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100%	4.999.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	4.999.300	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	2.987.386.088	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100%	2.987.398.459	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	2.987.386.088	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	2.987.398.459	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	268.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	100%	230.640.900	



	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.989.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	54.981.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	90.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	2 paket	8.500.000,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	2 paket	8.499.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	62.171.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jakarta	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	229.503.420	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	33 unit	300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor yang disediakan	33 unit	229.503.420	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatkan kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.525.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	meningkatkan kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.474.896.236	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	15.000.000,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	8.989.100,	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	310.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	306.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 lap	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 lap	1.159.107.136	

f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.750.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100%	1.506.650.064	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	969.537.868	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	600.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	3 unit	395.343.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	8 unit	150.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	8 unit	141.769.196	
2	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Jakarta	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung</b>	<b>90</b>	<b>3.660.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	Jakarta	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung</b>	<b>90</b>	<b>3.323.474.541</b>	
g	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	3.660.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90	3.323.474.541	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	160.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	12 lap	159.920.561	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 lap	500.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 lap	314.777.196	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	3.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	12 lap	2.848.776.784	
<b>TOTAL</b>					<b>10.495.886.08</b>					<b>9.757.562.920</b>	
					<b>8</b>						

## 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penghubung Provinsi Bali pada tanggal 20 Pebruari 2024 melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk menerima masukan dari stakeholder terkait mengenai program dan kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan di Tahun 2025 sesuai dengan Tupoksi Badan Penghubung yaitu fungsi sebagai pembantu pemerintah daerah dalam tugas koordinasi di Ibu Kota Jakarta dan sebagai *show window* kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada wisma Badan Penghubung Bali dan meningkatkan sarana promosi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan Daerah Bali TMII Jakarta. Adapun stakeholder Pemerintahan yang kami undang adalah :

1. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bali;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
10. Sekretariat DPRD Provinsi Bali;
11. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
12. Kepala Biro Organisasi setda Provinsi Bali;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
14. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali;
15. Kepala Bagian Umum Setda Kab/Kota se-Bali;
16. Kepala Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Bali;

17. Kepala Dinas Kebudayaan Kab/Kota se-Bali.

Sedangkan stakeholder diluar pemerintah kami mengundang :

1. Direktur Eksekutif TMII di Jakarta;
2. Ketua PHDI DKI Jakarta;
3. Ketua PSN DKI Jakarta;
4. Ketua SBI DKI Jakarta;
5. Ketua WHDI DKI Jakarta;
6. Ketua SDHD DKI Jakarta;
7. Pimpinan Sanggar Seni Se-jabodetabek;
8. Ketua KPSHD se-DKI Jakarta;
9. Ketua KMHDI DKI Jakarta.

Seluruh undangan kami undang online melalui link zoom. Ada banyak sekali masukan dan saran untuk Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali untuk Tahun 2025.

Tabel 7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sinergitas kegiatan Promosi budaya Bali di Jakarta untuk dapat berkolaborasi dengan SDHD DKI Jakarta atau PHDI DKI Jakarta	Jakarta	Kegiatan kolaborasi	Belum ditentukan	Usulan dari PHDI DKI Jakarta
2	Manfaatkan orang Bali yang ada di Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan promosi budaya Bali di Jakarta	Jakarta	Kegiatan kolaborasi	Belum ditentukan	Usulan dari SDHD dan PHDI DKI Jakarta
3	Memberikan pembinaan terkait kesenian kepada seniman Bali yang ada di	Jakarta	Terlaksananya pelatihan	1 kali	Usulan dari SDHD DKI Jakarta

	Jakarta				
4	Memberikan pembinaan kepada pinandita dan serathi banten yang ada di Jakarta untuk persamaan persepsi terkait upakara.	Jakarta	terlaksananya pelatihan	1 kali	Usulan dari PSN DKI Jakarta
5	Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan, pelestarian seni dan budaya dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota se- Bali	Jakarta	kegiatan kolaborasi	belum ditentukan	Usulan dari Bappeda Provinsi Bali
6	Butuh suport pengembangan UMKM yang dikelola WHDI DKI Jakarta. Butuh suport pelestarian budaya untuk tenaga pelatih tabuh. Butuh suport untuk sekolah pasraman Hindu yang ada di Jakarta	Jakarta	kegiatan kolaborasi	belum ditentukan	Usulan dari WHDI DKI Jakarta
7	Partisipasi penyelenggaraan kesenian budaya di TMII	Jakarta	Kegiatan promosi pariwisata dan kesenian	Sepanjang Tahun	Usulan Manajemen TMII
8	Pembinaan terkait pembekalan pengembangan soft skill tentang kepemudaan	Jakarta	terlaksananya pelatihan	1 kali	Usulan KMHDI DKI Jakarta
9	Agar program yang ada di daerah dapat di sinkronkan dengan Badan Penghubung Provinsi Bali	Jakarta	kegiatan kolaborasi	Sepanjang Tahun	Usulan dari Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
10	apabila memungkinkan di anjungan TMII, setiap periode tertentu, diberikan kesempatan untuk menampilkan atraksi wisata di destinasi pariwisata yang ada di Kab/Kota di Bali, jadi tidak hanya tarian2 saja	Jakarta	kegiatan kolaborasi	Sepanjang Tahun	Usulan dari Dinas Pariwisata Kab. Buleleng

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 8

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal "Branding Bali" serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi kerthi Bali
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri

	pemasaran pariwisata	pariwisata dan ekonomi kreatif
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali
7	Meningkatkan investasi daerah	a. Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		b. Memberikan insentif investasi
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	a. Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
		b. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	a. Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
		b. Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
		c. Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	a. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani

		b. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
		c. Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis kawasan
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	a. Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan
		b. Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi
		c. meningkatkan akses pangan masyarakat
		d. Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
		b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
		c. Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
		b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
		c. Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
		d. Meningkatkan capaian literasi dan numerasi
16	Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
		b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat



		c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	a. Meningkatkan pengarusutamaan gender
		b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	a. Meningkatkan kualitas keluarga
		b. Meningkatkan sistem data gender dan anak
		c. Meningkatkan pemenuhan hak anak
		d. Meningkatkan perlindungan khusus anak
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	a. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.
		b. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat
		c. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat
		d. Memantapkan pembangunan Desa Adat
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	a. Memberdayakan lembaga, tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda
		b. Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya
		c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya
		c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya

24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana	a. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana
		b. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah
		c. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
		d. Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta	a. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional

	perlindungan masyarakat	dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
		b. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Peningkatan Investasi pengurangan RB
		b. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
		c. Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
		c. Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	a. optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
		b. Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 disusun mengacu pada sasaran pada Peraturan Gubernur RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyelarasan pencapaian sasaran

pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2024 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2024 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 9

## Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN
	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali</li> <li>2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali</li> <li>3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan</li> <li>4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok</li> </ol>
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pendidikan</li> <li>3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali</li> </ol>
	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat</li> <li>2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali</li> <li>3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali</li> </ol>
	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan</li> <li>2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah</li> <li>3. Meningkatnya penggunaan energi bersih</li> <li>4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</li> </ol>
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik</li> <li>2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik</li> <li>3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ol>
	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya kehidupan</li> </ol>

		demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4 : Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5 : Lingkungan Hidup

Prioritas 6 : Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek

kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut,

penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

#### 1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

#### 2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

#### 3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu,

proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se- Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

#### 4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

#### 5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat



Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

#### 6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

#### 7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Bali**

Menunjuk pada RPD Provinsi Bali 2024-2026, dan Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024-2026 maka telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

#### 3.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
- Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

### 3.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

Tabel 10 :

Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Target 2025
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) program dan mencakup 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,  
dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG, dengan kegiatan:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

Jumlah program yang direncanakan pada Rancangan Renja Tahun 2025 secara keseluruhan adalah 2 (dua) program dengan total 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp.9.757.562.920,00,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut : Terlampir Renja Tahun 2025

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak serta ketersediaan anggaran. Adanya renja ini diharapkan agar Badan Penghubung Provinsi Bali serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

Jakarta, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG



**ARIFIN EFENDI, ST., MT**

NIP. 197107142000031003

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>BADAN PENGHUBUNG</b>						<b>9.757.562.920,00</b>							<b>11.132.000.000,00</b>	
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>9.757.562.920,00</b>							<b>11.132.000.000,00</b>	
	<b>5.07</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>						<b>9.757.562.920,00</b>							<b>11.132.000.000,00</b>	
1.	<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)</i>	-			<b>82 Nilai</b>	<b>6.434.088.379,00</b>						-	<b>7.322.000.000,00</b>	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, panggangan dan evaluasi kinerja perangkat</i>	-			100 persen	4.999.300,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	4.999.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			16 Orang/ Bulan	2.987.398.459,00			-	-	-	-	3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/ Bulan	2.987.398.459,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor</i>	-			100%	230.640.900,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	299.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.989.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	54.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	8.499.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	62.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</i>	-			100%	229.503.420,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	229.503.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100%	1.474.896.236,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.642.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	8.989.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	306.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		325.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.159.107.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah</i>	-			100%	1.506.650.064,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.925.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				13 Unit	969.537.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	395.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	141.769.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	<i>Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta</i>	-			90 Indeks	3.323.474.541,00						-	3.810.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<i>Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung</i>	-			90 Indeks	3.323.474.541,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	3.810.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				12 Laporan	159.920.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>				12 Laporan	314.777.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				12 Laporan	2.848.776.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
			<b>J U M L A H</b>					<b>9.757.562.920,00</b>							<b>11.132.000.000,00</b>	